

Abstrak

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi salah satu landasan tertinggi terhadap segala bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saat ini secara implementatif Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan terhadap penyelesaian sengketa pilkada berdasarkan kewenangan tambahannya, padahal penyelesaian sengketa pilkada diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak adanya kepastian hukum terhadap terbentuknya badan peradilan khusus. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, konsep, perbandingan dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Kepastian hukum terbentuknya badan peradilan khusus haruslah menjadi urgensi dalam menghadapi pemilu serentak pada tahun 2024. Dalam membantu menjawab terhadap kepastian hukum peradilan khusus pikada tentunya ada beberapa cara antara lain, memahami penafsiran konstitusional, teori kepastian hukum dan bentuk-bentuk badan peradilan khusus pilkada.

Kata kunci: Sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi, Badan peradilan khusus.



Abstract

The authority of the Constitutional Court as regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia is one of the highest foundations for all forms of authority of the Constitutional Court. Currently, the Constitutional Court has implementative authority over election dispute resolution based on its additional authority, even though election dispute resolution is resolved by a special judicial body. This is one of the reasons for the lack of legal certainty regarding the establishment of a special judicial body. In this study using the method of legal approach, concept, comparison and using the type of normative juridical research. Legal certainty for the establishment of a special judicial body must be an urgency in facing simultaneous elections in 2024. In helping to respond to the legal certainty of a special judicial body for regional heads, of course there are several ways, including understanding constitutional interpretation, the theory of legal certainty and forms of special judicial bodies for regional elections.

Keywords: Constitutional Court, Regional Election Disputes, Special Judiciary.

